

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT)

Nunung Runiawati, Rina Hermawati, dan Elisa Susanti

Universitas Padjadjaran
Jalan Raya Bandung-Sumedang Km 21 Jatinangor 45363 Sumedang
E-mail: nruniawati@yahoo.com

Abstract

West Bangka is the district with the highest level of gross regional domestic product (GRDP) in Bangka Belitung Province. However, the average contribution of local own-revenue to local revenue over the last three years was 6.57% and 93.43% still depended on intergovernmental (IG) fiscal transfers (transfers from central government), transfers from the provincial government and other legal local revenues. This study focuses on identifying the challenges faced by local government in enhancing local own-revenues by using qualitative research methods. The results shows that 1) taxpayers who provide the biggest contribution to local revenues derived from state-owned enterprises, while the taxpayer derived from the local population is still low. Residents prefer to spend their money in other regions, such as Bangka Induk. 2) local government has not been able to optimize existing potential, and 3) there is dependence on tin as one of the main sources of livelihood of local residents. The suggestions in this research are as follows: to encourage local government to make urban-biased policies and also to enhance public education in order to create diversified livelihood and to provide insight to the public about the importance of participation in development.

Keywords: *enhancing; local-own revenue; West Bangka*

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2001, Indonesia melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal, administratif dan politis secara bersamaan. Sejak saat itu, Indonesia berubah dari negara yang sangat sentralisasi menjadi negara yang sangat desentralisasi. Banyak daerah baru yang terbentuk pasca reformasi hingga dikenal dengan istilah “Big Bang” decentralization. Terdapat tiga tujuan utama desentralisasi menurut undang-undang yaitu meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

Sesuai dengan prinsip *money follows function* maka desentralisasi tidak hanya dimaknai secara politik dan administrasi namun juga secara fiskal atau dikenal dengan istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya tercermin pada struktur Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Desentralisasi fiskal tidak hanya mengatur tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah (salah satunya dalam bentuk pendapatan transfer) tetapi juga menuntut daerah agar

dapat meningkatkan kreativitas dalam menghimpun pendanaan sehingga dapat membiayai pengeluaran daerah sesuai dengan kebutuhannya (*self financing*). Salah satu wujud dari *self financing* ialah dengan memelihara agar kontribusi PAD baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, menunjukkan tren yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah. Kontribusi yang baik dari PAD terhadap pendapatan daerah juga memberikan gambaran bahwa daerah tersebut maju dan mandiri.

Bangka Barat merupakan salah satu Kabupaten pada Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap APBN. Data selama tiga tahun terakhir (2011-2013) menunjukkan bahwa proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah sebesar 80,6%. Sementara, proporsi PAD yang menunjukkan *self financing power* rata-rata sebesar 6,57% selama tiga tahun (2011-2013). 12,83% kontribusi lainnya berasal dari transfer pemerintah provinsi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Disisi lain, mengacu pada data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun dikehui bahwa Bangka Barat memiliki PDRB tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2009-2013) (PDRB Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Lapangan Usaha 2009-2013, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah).

Kondisi inilah yang melatarbelakangi penelitian ini dimana Bangka Barat

menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah yang masih rendah. Problem statement difokuskan pada (1) identifikasi permasalahan dalam menghimpun PAD dan (2) strategi optimalisasi dalam meningkatkan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam peningkatan PAD serta untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan PAD.

TINJAUAN TEORETIS

Optimalisasi pendapatan asli daerah merupakan suatu upaya peningkatan kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan cara memaksimalkan potensi yang ada melalui upaya perbaikan kebijakan, prosedur, dan tata cara pengelolaannya.

Beberapa manfaat dalam memaksimalkan pendapatan ialah sebagai berikut¹:

- *Reduces the need to cut programmes and services unnecessarily.*
- *Improves the potential for offering new or improved services.*
- *Increases visibility and accountability for the staff that are responsible for revenue generation and collection.*
- *Develops opportunities to make the overall revenue structure more equitable and efficient and less dependent on just a few revenue sources.*

1 Ministry of Local Government and Provincial Councils and Good Governance For Local Government (SLILG). 2008. *Revenue Enhancement: Financial Management Training Module 2 of 4*. Hal 10

- *Identifies user charges and fees that may not be covering the cost of service to the extent required by the city's financial policies.*
- *Identifies weaknesses in the city's financial management procedures or organization.*
- *Reveals areas of future concern to assist in budgeting and forecasting*

Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi PAD memberikan banyak keuntungan demi terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti kita ketahui bahwa optimalisasi PAD bukanlah perkara yang mudah, dibutuhkan strategi yang komprehensif serta komitmen diantara para pemangku kepentingan untuk meningkatkannya.

Terdapat beberapa pendekatan yang disarankan oleh para ahli dalam meningkatkan PAD, yaitu sebagai berikut.

Strategi Optimalisasi dengan Mengkaji Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Berdasarkan tulisan Talierco yang dipublikasikan oleh World Bank, Negara-negara yang menganut desentralisasi fiskal harus mempunyai desain fiskal yang tepat. Pemerintah daerah harus mempunyai kewenangan dalam menggali pendapatan daerahnya masing-masing. Talierco mengemukakan bahwa Negara Indonesia tidak sepenuhnya menganut desentralisasi fiskal karena pemerintah daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang sedikit untuk membiayai kegiatannya. Sumber pendanaan pemerintah daerah tergantung pada sumber pemerintah pusat. Faktanya adalah bahwa pemerintah daerah di Indonesia mempunyai sedikit kewenangan untuk

meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan keterbatasan kapasitas untuk mewujudkan tujuan dari desentralisasi fiskal.

Talierco mengemukakan strategi untuk mendesain pendapatan pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi fiskal melalui 3 perspektif²:

1. The assignment of revenue sources among types of government

Which taxes should be authorized or assigned to central governments and which to subnational governments? The decision should be legal and transparent, occurring through both constitutional and legislative processes.

Beberapa prinsip dalam *assigning taxes between national and local governments* adalah:

- 1. "Finance follows function" is that it should be based on assigned expenditures.*
 - 2. Given the matching of revenues to expenditures, is that local taxation should avoid introducing economic distortions by inappropriately taxing the factors of production.*
 - 3. Subsidiarity. Holds that revenue should be assigned to the lowest-possible level of government, except where such assignment would produce economic distortions or negative externalities.*
- #### *2. The degree of autonomy with which subnational governments can exercise their assigned authority.*

2 Talierco, Robert. Subnational Own Resource Revenue: Getting Policy and Administration Right, East Asia Decentralizes. <http://siteresources.worldbank.org>

If subnational governments have total or significant control over a tax, fee, or charge - it is a subnational tax. If, in contrast, subnational governments have no control over the base and rate of a tax - it is not a subnational source of own-revenue.

Tax sharing occurs when the base and rate of a tax are centrally set and then some percent is returned, typically on a derivation basis, to the “originating locality.” To be an own-tax or revenue source, the subnational unit must, at the very least, legislate the rate.

3. *The efficiency of the revenue administration system.*

Subnational governments must have some control over revenue administration.

- 1) *First, control over some aspects of revenue administration is instrumental for controlling revenues at the margin, as this allows for changes in the effective tax rate (a ratio of actual tax collected compared with the size of the legal tax base). Local governments can change the effective tax rate by boosting compliance through audits and enforcement, or by lowering compliance costs for tax-payers through better services (such as more user-friendly tax forms and payment processing, and access to information)*
- 2) *Second, subnational governments need not have full control over administration to call a tax or fee an own-source revenue. Devolved responsibility does not necessarily imply fully*

devolved administration, especially in the context of weak local capacity. National governments, for example, might take responsibility for certain administrative functions, such as assessing property, or assist local governments with core functions related to information and communications technology.

Strategi Optimalisasi dengan Memfokuskan pada Kebijakan

Beberapa kebijakan juga harus ditempuh sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan PAD seperti yang diungkapkan oleh Chijoriga³ yang memfokuskan pada kebijakan perpajakan:

1. *Improvement on the fiscal policy, legal and regulatory framework;*
 - *Improvement on the tax exemptions policies and regulations.*
 - *Equal treatment of all investors - inclusive taxation local and foreign investors*
2. *Broadening the Tax Base - What it means*
 - *Expanding the total value of all incomes and/or property*
 - *Increase the number of tax payers or type of taxes*
 - *Informal sector increase number of tax payers through registration or regularization*
 - *Improvement of the business environment – improvement in the economic growth – more*

3 Dr. Marcellina Mvuula Chijoriga “New Areas for Enhancement of Revenue Collection and Broadening Tax Base of The Country yang dipresentasikan dalam Consultative Forum Organize By The CAG on March 2, 2012

- taxable business (corporate tax), more employment (PAYE), more consumption (VAT)*
3. *Broadening the Tax Base – Strategies*
 - *Formalization of the informal sector – National identification cards, simplification of business registration procedures, enhance compliance, controlling fraud and minimizing tax avoidance, enhancing Block management system (BMS), application of ICT based systems for mapping the blocks.*
 - *Improve the formalization of properties and business formalization (registration and licensing) – Improved business climate – cost of doing business. Improving investment climate*
 - *Improvement of tax collection in other sectors in the – natural resource, fishing, forestry, mining, energy etc.*
 4. *Improved fiscal prudence and Financial Discipline and Economic Management – Cost Cutting and Resource Rationalization Measures*
 - *Reduce and prioritize expenditures*
 - *Focused expenditure – balance between recurrent and development (investments) expenditure*
 - *Improved financial Management- focused on outputs vs processes*
 - *Improve Internal and external Audits – local government authorities.*
 5. *Improvement in the Tax Administration*
 - *Improvement and modernization of the customs systems – tax controls vs trade facilitation, one stop system, control and monitoring of the transit goods.*
 - *Implementation of the performance based and responsive leadership and management – improved governance- responsibility- accountable leadership and supervision, change management and staff integrity*
 - *Building sector specific administration capacity*
 6. *Enhances tax payers education*
 - *Understand the need to pay taxes- principal of large numbers*
 - *Understand what tax can do to improve our economy*
 - *Participate in formalized economic activities*
- Strategi Optimalisasi dengan Memfokuskan pada Prosedur Pengelolaan PAD**
- Terdapat beberapa permasalahan terkait PAD, khususnya pajak daerah, seringkali terdapat piutang pajak atau bahkan *potential lost* dalam proses pengumpulannya. Oleh karenanya diperlukan prosedur yang tertulis dan legal dalam perencanaan, pemungutan, pencatatan, dan pengawasan PAD. Melalui prosedur inilah peran, tugas, dan kewenangan para pihak dapat tergambarkan secara jelas. Selain itu juga prosedur tertulis menjamin pelaksanaan secara konsisten, akurat dan efisien⁴.
- Beberapa prosedur yang harus ada ialah⁵:
-
- 4 Ministry of Local Government and Provincial Councils and Good Governance For Local Government (SLILG). 2008. *Revenue Enhancement: Financial Management Training Module 2 of 4*. Hal 17
- 5 Ibid 17

1. *Billing Procedures:*

- *Preparing the Billing List*
- *Preparing the Actual Bill*
- *Handling of Requests for Abatement of Billed Amounts*
- *A Schedule of Key Dates and Activities*

2. *Collection Procedures*

- *Procedures for Accepting Payment at the Counter*
- *Procedures for Accepting Payment the Mail (if applicable)*
- *Procedures for Posting Partial Payments to Accounts*
- *Procedures for Posting Payments to Accounts*
- *Procedures for Checking Daily and Monthly Collections*

3. *Delinquent Accounts*

- *Send Second Notices*
- *Add Penalties for Late Payment*
- *Advertise the Delinquency of the Notice Board*
- *Terminate the Service*
- *Turn the Account Over to Supplemental Collectors*
- *Use the Court System*
- *Impose Tax Liens*
- *Offset Any Refund Due*
- *Withhold Vendor Payments*
- *Innovative Schemes*

Selain itu beberapa prosedur penindakan terhadap wajib pajak yang belum menyetor pajak. Beberapa prosedur tersebut diantaranya sebagai berikut:

A sample collection plan for overdue water accounts might state⁶:

1. *All bills still outstanding after 30 days shall be subject to interest penalties*

and shall receive a second notice demanding payment of the bill.

2. *All bills still outstanding after 60 days shall be turned over to a private collections agency for personal calls at the billing address of the account holder. Also, no refunds or vendor payments shall be issued to the account holder until the bill is satisfied.*
3. *All bills still outstanding after 90 days shall be advertised on the notice board outside the LA and library.*
4. *All bills still outstanding after 120 days shall be subject to termination of service, followed by initiation of court action by the LA to recover all amounts due, including interest and the costs of collection, such as advertising and court costs.*

Strategi Optimalisasi dengan Memfokuskan pada Teknik Penagihan

Strategi lain difokuskan pada upaya penagihan pendapatan melalui teknik sebagai berikut⁷:

1. *80/20 Rule*

Focus on collecting from the most important accounts i.e. the ones with the largest amount due. If you have two accounts—one that owes Rs 10 and one that owes Rs 1,000 – which one do you want to collect from? It would take one hundred Rs 10 accounts to equal the Rs 1,000 account. Generally, 80% of the amount owed can be collected from 20% of the accounts. Rs 10 accounts to equal the Rs 1,000 account. Generally, 80% of the amount owed can be collected from 20% of the accounts. When targeting

6 Ibid 23-24

7 Ibid 26-27

which accounts to focus collection efforts on, always sort the list by the amount owed and contact the largest debtor first. Add up the amount owed from the top 20% of accounts and see what proportion it is of the total amount of arrears – it will probably be near 80%!

2. Newer Accounts

When deciding on which accounts you will focus on after contacting the citizens that owe the most money, you should focus on the accounts that are the newest. If a person has the money to pay, but does not pay and is not contacted – they will believe it is not necessary to pay. Do not let accounts go unnoticed and without contact for more than 30 days. This is why it is important to set a revenue collection policy regarding the amount of time an account is allowed to be in arrears. We will work on this later in this workshop. The older the arrears, the harder it is to collect. Often a simple request for an amount owed is all that is required for a citizen to pay. The threat of action usually forces a delinquent account holder to pay. Doing nothing, never forces a person to pay what they owe!

3. Flexible Payment Schemes

Often, citizens are unable, but willing to pay what they owe. If this is the case, a LA should work with the account holder to offer a solution that is mutually acceptable. You might offer the citizen the opportunity to pay a smaller amount than is due in order to receive some payment. If they see the LA is willing to work with them, they will be more willing to pay. If a person owes Rs 100, ask them to pay

Rs 10 this week, Rs 20 the following week, Rs 30 in week three, etc., until the account is all paid. This is called a graduated payment plan.

Strategi Optimalisasi dengan Memfokuskan pada Model Proyeksi (Penetapan Target yang Kredibel)

Seringkali permasalahan optimalisasi PAD terletak pada penetapan target yang rendah, melalui *best practice* yang dilakukan oleh tim formulasi model-model penerimaan perpajakan mencoba mengembangkan 5 model dalam rangka penetapan target penerimaan perpajakan negara Bidang Kebijakan PK APBN Tahun Anggaran 2009.

Perumusan model ini dilatarbelakangi adanya peningkatan perpajakan yang tidak diimbangi dengan meningkatnya *tax ratio* (perbandingan antara penerimaan perpajakan dengan PDB Nasional. Untuk itu, Tim mengedepankan pentingnya melakukan proyeksi penerimaan perpajakan yang kredibel agar target akurat dan dapat dicapai (2009:2).

Berikut akan dijelaskan 5 model perpajakan yang mempunyai hubungan keterkaitan dalam menetapkan target perpajakan, yaitu:

1. Model monitoring penerimaan perpajakan (model bulanan);
2. Model target penerimaan perpajakan (model tahunan);
3. Model dampak kebijakan terhadap penerimaan perpajakan;
4. Model perhitungan potensi penerimaan perpajakan;
5. Model target penerimaan perpajakan per sektor

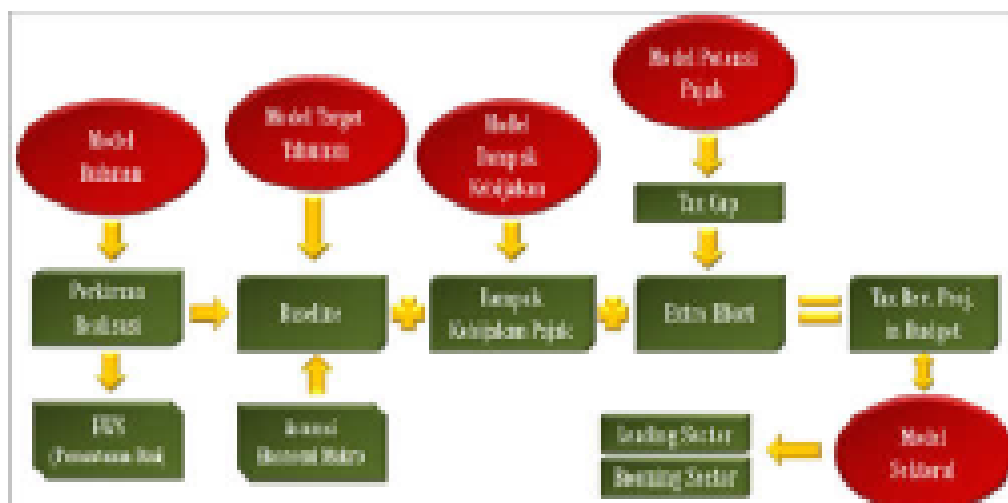
Hubungan keterikatan antarkelima model tersebut dapat digambarkan sebagaimana gambar 1.

Adapun Penjelasan dari kelima model tersebut ialah sebagai berikut:

“Mencatat realisasi penerimaan perpajakan secara berkala setiap bulan untuk memantau perkembangan realisasi penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan target penerimaan perpajakan secara bulanan dan sekaligus perkiraan realisasi (outlook) selama satu tahun anggaran. Hasil dari perkiraan realisasi selama satu tahun tersebut akan digunakan sebagai baseline untuk menghitung proyeksi penerimaan perpajakan tahun berikutnya, dengan memperhitungkan berbagai pengaruh dari beberapa indikator ekonomi makro. Pengaruh dari kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah dalam tahun tertentu terhadap penerimaan perpajakan

dihitung menggunakan model dampak kebijakan yang hasilnya dipakai sebagai faktor penambah (*potential gain*) ataupun faktor pengurang (*potential loss*) terhadap perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan tahun berikutnya.

Untuk mengetahui apakah perhitungan proyeksi penerimaan pajak sudah akurat maka perlu diketahui besarnya potensi penerimaan pajak yang sesuai dengan kondisi perekonomian yang sebenarnya. Dengan membandingkan perhitungan potensi dan proyeksi penerimaan perpajakan akan diketahui besarnya selisih pajak (*tax gap*) yang biasa dipakai untuk mengukur tingkat optimalisasi penerimaan perpajakan. Untuk meminimalisir gap tersebut, perlu diupayakan langkah-langkah yang bersifat administratif yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan (*extra effort*). Dari penjumlahan perhitungan *baseline*, *potential gain/loss*, dan *extra*



Gambar 1
Model Proyeksi Perpajakan

Sumber: Tim Formulasi Model-model penerimaan perpajakan dalam rangka penetapan target penerimaan perpajakan negara Bidang Kebijakan PK APBN Tahun Anggaran 2009

effort tersebut akan menghasilkan suatu proyeksi penerimaan perpajakan yang nantinya akan dipakai untuk menyusun anggaran (APBN). Dari target tahunan yang telah ditetapkan kemudian dihitung target penerimaan perpajakan menggunakan model sektoral, untuk menetapkan target penerimaan sesuai dengan sektor-sektor lapangan usaha. (Tim Formulasi Model-Model Perpajakan, 2009:2-3)”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Irawan (1999:10) mengungkapkan “penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta”.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, maka metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menganalisis regulasi dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, mengingat kedua hal ini akan relevan dengan peningkatan PAD Kabupaten Bangka Barat.

Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara/FGD dan dokumentasi

1. Wawancara/FGD

Teknik wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan atau persepsi informan (artikulasi dari para informan) tentang topik yang diteliti. Wawancara dilakukan

terhadap staf Bappeda, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta instansi terkait pengelolaan APBD di Kabupaten Bangka Barat. Secara garis besar, topik-topik yang diwawancarakan menyangkut kondisi eksisting APBD, masalah dalam pengelolaan APBD dan visi pemerintah tentang APBD. Selain itu, informasi ini dapat diperoleh pula melalui kegiatan FGD dengan mengumpulkan beberapa orang informan dalam kegiatan bersama untuk mendiskusikan mengenai topik penelitian.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyek penelitian sehingga peneliti memiliki pemahaman mengenai karakteristik objek yang diteliti

3. Dokumentasi

Bahan-bahan dokumentasi yang digunakan terutama berhubungan dengan data mengenai Kabupaten Bangka Barat. Bahan-bahan dimaksud antara lain mengenai karakteristik sosial ekonomi, regulasi terkait APBD dan APBD Kabupaten Bangka Barat dalam 5 tahun terakhir.

HASIL PENELITIAN

Identifikasi Permasalahan dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Barat.

PAD terdiri dari 4 komponen utama yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola PADnya

sendiri yang mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Beberapa permasalahan Khusus dalam optimalisasi PAD seperti yang dihadapi oleh Bangka Barat sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang memberikan kontribusi terpesar pada pendapatan daerah berasal dari BUMN sementara wajib pajak yang berasal dari masyarakat setempat masih rendah.

Pada tahun 2014, Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi tertinggi pada sektor pajak. Namun, besarnya kontribusi Pajak Penerangan Jalan disebabkan keberadaan 3 BUMN besar di Kabupaten Bangka Barat yaitu PT. Tambang Timah, Tbk, PT. Perkebunan Sawit, dan Perusahaan Listrik Negara Persero. Adapun Tahun 2013, BPHTB memberikan kontribusi terbesar disebabkan pada tahun tersebut terdapat perpanjangan sertifikat PT. Tambang Timah, Tbk. sehingga nilai BPHTB meningkat 10 Milyar. Dengan demikian kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2011, 2012, 2014 dan BPHTB pada tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh kontribusi BUMN pada kedua jenis pajak tersebut dan bukan pada potensi masyarakat setempat

2. Pemerintah Daerah belum mampu meningkatkan potensi yang ada

- Pertama, jika dicermati Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan *closed list* terkait jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh daerah. Sumber penerimaan pajak daerah yang berlaku saat ini cenderung bias ke

daerah yang tingkat urbanisasinya tinggi (*urban-biased*), seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga untuk daerah yang unsur kotaannya tidak terlalu tinggi potensi penerimaan pajaknya menjadi kecil”. Untuk itu dibutuhkan kreativitas bagi setiap daerah, khususnya Bangka Barat agar mampu mengoptimalkan potensinya.

Bangka Barat memiliki 15 Wisata Pantai, 4 Wisata Alam dan 11 Wisata Sejarah. Potensi wisata yang ada belum mampu mendorong *urban-biased*, wisatawan yang datang ke Bangka Barat pada umumnya hanya singgah dan kembali ke tempatnya masing-masing sehingga tidak menimbulkan *multiflier effect* bagi pendapatan untuk usaha hotel, restoran, hiburan, reklame, dan lain-lain. Hal ini disebabkan belum adanya grand design pengembangan pariwisata dan kebudayaan serta sarana dan prasarana pariwisata belum dikelola dengan baik.

- Kedua, berkaitan dengan kebijakan dan prosedur. Terdapat beberapa regulasi penetapan tarif retribusi yang telah usang dan harus ditinjau kembali. Belum optimalnya mekanisme pengawasan dan penindakan yang disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur.
- Ketiga, lemahnya data base khususnya terkait pajak PBB P2 dan BPHTB. Kedua pajak tersebut berpotensi memberikan kontribusi

yang lebih jika didukung oleh data nilai jual objek pajak (NJOP) yang akurat serta data potensi wajib pajak.

- Keempat, keterbatasan sarana dan prasarana. Pemerintah Daerah memiliki regulasi terkait dengan retribusi daerah, namun karena keterbatasan sarana dan prasarana pemungutan retribusi ini belum dapat dilaksanakan.

3. Ketergantungan terhadap timah sebagai sumber mata pencaharian utama

Mayoritas mata pencaharian penduduk sebagai penambang timah. Tingginya PDRB Bangka Barat salah satunya disebabkan oleh hal tersebut. Namun demikian hasil tambang timah belum mampu mendorong PAD. Salah satu penyebabnya adalah residents prefer to spend their money in other regions, such as Bangka Induk. Hal ini disebabkan kurang tersedianya beragam kebutuhan di daerah tersebut. Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat UMKM di Bangka Barat namun kreatifitas masyarakat dalam menghasilkan barang/jasa yang memiliki nilai jual tinggi masih terbatas. Jika mengacu kepada daerah lain yang memiliki PAD tinggi seperti Bandung dan Bali salah satunya dihasilkan melalui kegiatan ekonomi kreatif masyarakatnya. Kreativitas masyarakat dalam menjual kuliner akan meningkatkan pajak restoran, kreativitas dalam mengelola hiburan akan meningkatkan pajak hiburan, dan sebagainya. Dengan kata lain kenaikan PAD dapat disebabkan dari efek rentetan aktivitas ekonomi masyarakatnya.

Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan mandat UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan peluang bagi daerah untuk melakukan pemungutan secara lebih optimal. Disisi lain, Bangka Barat memiliki potensi untuk meningkatkan PAD khususnya dari sektor penerimaan pajak sebab memiliki nilai PDRB yang tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bangka Belitung. PDRB sangat erat kaitannya dengan pajak daerah karena dapat menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi daerah baik tentunya akan menjadi potensi penerimaan pajak di wilayah tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka strategi optimalisasi PAD Bangka Barat harus didorong pada pembangunan wilayah yang dapat menstimulasi masyarakat ataupun pihak lain yang melakukan kegiatan di wilayah Bangka Barat.

Tantangan terberat yang dihadapi Bangka Barat adalah pada perilaku masyarakat setempat, diantaranya sulitnya menumbuhkan kreativitas sebab mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertambangan timah yang tidak menuntut kreativitas yang tinggi. Sementara peningkatan PAD sangat ditentukan oleh kreativitas pemerintah dan masyarakat setempat. Oleh karena itu beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan PAD adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan *urban-biased*

Sektor Pariwisata

- *Pertama*, pembuatan *grand design* pengembangan pariwisata.

- *Kedua*, Dalam mendorong wisatawan untuk mengunjungi Bangka Barat salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang memadai. Saat ini wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata alam, wisata bahari, wisata sejarah dan wisata agro belum ditarik retribusinya. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang belum dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah sehingga tidak dapat ditarik retribusinya.
- *Ketiga*, melakukan promosi kegiatan pariwisata dan kebudayaan yang terintegrasi dengan program pemberdayaan dan pengembangan. Pengembangan sektor pariwisata dan pemberdayaan UMKM tidak akan berhasil jika pemerintah tidak melakukan promosi secara masif dan berkesinambungan. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai media untuk menarik wisatawan mengunjungi Bangka Barat dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata seperti agen perjalanan wisata, bus pariwisata, dan lain sebagainya.
- *Keempat*, pembinaan budaya lokal agar mampu menjadi potensi wisata.

Sektor UMKM

- *Pertama*, pembinaan masyarakat sadar wisata. Dalam hal ini masyarakat diberi pemahaman agar menyadari potensi wisata yang dimilikinya sehingga mereka mampu merespon dengan

menjual produk-produk unggulan masyarakat setempat.

- *Kedua*, bantuan permodalan,
- *Ketiga* bantuan pemasaran produk-produk lokal seperti sarang burung walet, kerajinan timah, lada, jamur, dan sebagainya melalui pameran ataupun pembuatan sentra bisnis produk-produk UMKM pada tempat-tempat yang strategis.
- *Keempat*, optimalisasi jalur penghubung yaitu dengan mendorong masyarakat untuk mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan posisi geografis Bangka Barat berada dalam jalur penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Bangka.

Peningkatan Kapasitas Birokrat

Peningkatan kapasitas birokrat dapat ditempuh dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mampu meningkatkan kompetensi pegawai dalam mendukung upaya optimalisasi PAD.

Optimalisasi Kerjasama Investasi

Dalam penyediaan infrastruktur daerah selayaknya pemerintah daerah harus mampu menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk *public private partnership*. Hal ini menjawab permasalahan keterbatasan dana dalam penyediaan infrastruktur publik yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk menyediakan layanan pemerintah tetapi juga untuk kegiatan jasa usaha lainnya agar kota dapat tumbuh, sehingga daerah memiliki

fasilitas yang lengkap. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di Bangka Barat sehingga uang yang dibelanjakan di Bangka Barat akan menyebabkan kenaikan terhadap PAD.

2. Meningkatkan pemahaman masyarakat untuk mendorong keanekaragaman mata pencaharian serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Dalam kaitannya dengan kondisi masyarakat Bangka Barat yang mayoritas mata pencaharian sebagai penambang timah, perlu kiranya dilakukan keanekaragaman mata pencaharian masyarakat. Hal ini disebabkan karena aktivitas penambangan timah dapat menimbulkan dampak negatif di bidang sosial, budaya dan lingkungan. Di bidang lingkungan, dampak yang ditimbulkannya berupa kerusakan lingkungan sehingga memerlukan kegiatan reklamasi dengan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan dalam bidang sosial budaya menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap timah, sikap hidup pragmatis dan kurang berkembangnya kreativitas penduduk untuk melakukan diversifikasi mata pencaharian.

Perubahan kultur memerlukan upaya yang berkesinambungan dan konsisten. Perubahan kultur dapat dilakukan secara langsung melalui sosialisasi dan edukasi, maupun tidak langsung melalui pembangunan struktural dan proses sosial. Dengan demikian, perubahan kultur melibatkan 3 aspek utama yaitu stuktur, kultur dan proses sosial (Wirutomo, 2013). Dalam

aspek struktur perlu disusun kebijakan mengenai usaha penambangan timah ilegal disertai dengan penegakan hukum yang konsisten terhadap usaha penambangan ilegal dan kegiatan penambangan yang tidak disertai reklamasi. Selain itu, perlu kebijakan mengenai pemberian berbagai fasilitas dan bantuan bagi kegiatan ekonomi yang diharapkan berkembang di Bangka Barat. Misal, jika usaha yang diharapkan adalah perdagangan maka pada sektor ini perlu diberikan berbagai kemudahan seperti pemberian kredit lunak dan penyediaan tempat-tempat perdagangan. Demikian pula, jika sektor yang diharapkan adalah kerajinan timah maka perlu dibangun sentra-sentra kerajinan dan pemberian kredit lunak bagi para perajin.

Perubahan pada tingkat kultur dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara formal dan informal melalui berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, teman bermain, sekolah dan media massa. Mengingat lingkungan sekitar (keluarga dan teman bermain) mayoritas berasal dari lingkungan penambang, maka peran sekolah (lembaga pendidikan) dan media bisa lebih diintensifkan. Peran media massa dapat dilakukan dengan memanfaatkan media-media lokal, spanduk, buletin, dan sebagainya dengan menyampaikan pesan mengenai dampak negatif penambangan timah ilegal dan peran-peran lain yang diharapkan oleh warga Bangka Barat. Peran lembaga pendidikan dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan dengan memberikan mata

pelajaran yang dititikberatkan pada permasalahan lingkungan hidup dan mata pencaharian. Materi tersebut bisa diberikan secara terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada maupun dalam muatan lokal. Pada tingkatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, misalnya dapat dikuatkan materi mengenai perasaan cinta terhadap lingkungan dan menanamkan perbuatan-perbuatan yang mengembangkan kelestarian lingkungan dikaitkan dengan kondisi khusus di Bangka Barat. Sedangkan pada tingkatan Sekolah Menengah Atas dapat mulai diperkenalkan pekerjaan-pekerjaan lain di luar penambang timah, misalnya praktek bisnis (dari mulai merencanakan sampai menjalankan kegiatan usaha), kegiatan pertanian, dan lain sebagainya.

Sedangkan perubahan pada tahapan proses sosial dilakukan dengan penciptaan ruang ekspresi warga. Dalam rangka pembangunan proses sosial ini, beberapa kota di Indonesia

membangun ruang publik (*public space*) misal taman atau ruang terbuka lain seperti *city walk* atau jalan raya yang ditutup pada waktu-waktu tertentu, dan menyelenggarakan kegiatan kreatif warga di ruang publik.

SIMPULAN

Pada dasarnya penyebab utama rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah disebabkan oleh kurang mampunya daerah merespon kebijakan pemerintah pusat yang mendorong daerah melakukan urban-biased policy. Strategi peningkatan PAD akan berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembangunan dengan memanfaatkan potensi dan kekuatan ekonomi lokal. Pertumbuhan potensi dan kekuatan ekonomi lokal ini akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi daerah yang pada akhirnya akan menjadi sumber potensial bagi penerimaan daerah. Dengan demikian, kata kunci dari peningkatan PAD adalah optimalisasi pembangunan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chijoriga, Marcellina Mvuula. (2012). *New Areas for Enhancement of Revenue Collection and Broadening Tax Base of The Country*. Dipresentasikan dalam Consultative Forum Organize By The CAG on March 2, 2012
- Duncan CR. (2007). Mixed outcomes: The impact of regional autonomy and decentralization on indigenous ethnic minorities in Indonesia. *Dev. Change*
- Ministry of Local Government and Provincial Councils and Good Governance For Local Government (SLILG). (2008). *Revenue Enhancement: Financial Management Training Module 2 of 4*.
- Oates, Wallace E & John Joseph Wallis. (1988). *Decentralization in the Public Sector: An Empirical Study of State and Local Government*. University of Chicago Press

- Oates, William E. (2005). Toward a Second Generation Theory of Fiscal Federalism. International Tax and Public Finance
- Ringkasan Eksekutif Formulasi Model-Model Penerimaan Perpajakan: Studi Kasus Model Perhitungan Potensi Penerimaan PPh Non Migas*. Disarikan dari Tim Formulasi Model-Model Penerimaan Perpajakan Dalam Rangka Penetapan Target Penerimaan Perpajakan Negara, Bidang Kebijakan PK APBN Tahun Anggaran 2009
- Tarigan, Robinson. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wirutomo, Paulus. (2013) *Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo*. Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol. 18, No. 1, Januari 2013: 101-120

Lain-Lain:

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Retribusi Pelayanan dan Penyedotan Kakus

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing